

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, TRANSPARANSI PENGGUNAN DANA DESA, DAN KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA DESA BELULUK, KEC. PANGKALAN BARU, KAB. BANGKA TENGAH)

Ririn Yonara
Hendarti Tri Setyo Mulyani
Ryan Hasianda Tigor

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e.jurnal@stie-ibek.ac.id

ABSTRACT- *This study aims to examine the effect of accountability in managing village fund allocations, transparency in the use of village funds, and village fund policies on community welfare. This study also aims to jointly examine the accountability of village fund allocation management, transparency in the use of village funds and village fund policies on community welfare. This research was conducted in the village of Beluluk, Pangkalan Baru District, Central Bangka Regency. This type of research is quantitative research. Types of data that used in this study is primary data obtained directly by distributing questionnaires directly to the public Belulu Village. The total population is 3,988 people and the number of samples in In this study, 90 people from the Beluluk Village community as respondents with using purposive sampling technique. This study uses the JASP 0.14.1 tool for multiple regression analysis and its analytical methods. Based on the results of data analysis, the results show that Village Fund Allocation Management Accountability has a significant positive effect on Community Welfare. The results of the t test show that the t count is $2,974 > 1,987$ t table with a significance value of $0.004 < 0.05$, then H1 is accepted. Transparency in the use of Village Funds has a significant positive effect on Community Welfare. The results of the t test show that t t count is $3.207 > 1.987$ with a significance value of $0.002 < 0.05$, then H2 is accepted. The Village Fund Policy has a significant negative effect on Community Welfare. The results of the t test show that t count is $-2.886 > 1.987$ with a significance value of $0.005 < 0.05$, then H3 is accepted. This study also shows that the accountability for managing village fund allocations, transparency in the use of village funds and village fund policies together have a significant and significant impact on community welfare. The results of the f test show f count $10,901 > 2,711$ f table with a significance value of $0.001 < 0.05$, then H4 is accepted.*

Keywords: *Village fund allocation management accountability, transparency in the use of village funds, village fund policies, community welfare.*

I. PENDAHULUAN

Negara memiliki peran yang strategis dalam sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah desa atau pemdes adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah di tingkat desa. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nasional secara menyeluruh, bahkan desa dapat menjadi garda terdepan dalam mensukseskan semua program dan urusan pemerintah.

Desa Beluluk adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Desa ini mempunyai sekitar 10,61 km², berpenduduk sebanyak 4.006 jiwa (220) dan kepadatan 378 jiwa/km².

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki hak untuk mengatur semua kebutuhannya. Desa harus mampu mengatur dan mengurus pemerintahannya, memenuhi segala kebutuhan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Rendahnya kesejahteraan masyarakat desa dan minimnya dana operasional desa untuk menyelenggarakan pelayanan publik merupakan faktor penting yang membuat perlu adanya alokasi dana desa. (Hadi 2019).

Pemerintah desa diberikan dana yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pemberian alokasi dana desa oleh pemerintah daerah kepada desa diharapkan dapat digunakan dengan semestinya dan dipergunakan untuk pembangunan desa yang pada akhirnya akan menjamin kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa yaitu: (1) ADD bertujuan untuk membiayai program pemerintah desa, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan. (2) ADD bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat pedesaan melalui pembangunan skala desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Di desa, pemerintah juga dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000, pasal 2 Huruf d, yang

dimaksud dengan dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut Miriam Budiarmo (1998:780) akuntabilitas diartikan sebagai tanggungjawab orang-orang yang diberi tugas kepada orang-orang yang memberi tugas itu. Segala kegiatan pengelolaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pribadi yang berdaulat dalam suatu negara. Adanya prinsip tanggungjawab atau akuntabilitas dalam pengalokasian dan pengelolaan dana desa mencerminkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat berdampak besar terhadap pemberdayaan masyarakat.

Menurut Adrianto (2007), transparansi adalah keseriusan, keterbukaan secara global dan menciptakan peluang partisipasi aktif kepada seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Wujud dari bentuk transparan pemerintah desa terlihat dari kemudahan akses masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Hasilnya, masyarakat mengetahui sejauh mana dana desa yang ada digunakan dan bagaimana upaya pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana tujuan dari pelaksanaan kebijakan dana desa adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa. Bentuk kebijakan desa terkait dengan pengalokasian dana desa adalah adanya Badan Permusyawaratan Desa yang fungsi mengadakan musyawarah desa dengan kepala desa dan mengomunikasikan keinginan masyarakat agar kebijakan yang akan ditetapkan dilakukan untuk kepentingan dari komunitas.

Dalam sistem pemerintahan Desa Beluluk, telah terjadi keterlambatan pelaporan keuangan tahunan kepada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat mengalami keterlambatan juga yang berdampak pada penyaluran kepada masyarakat memerlukan waktu yang lama sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam menerapkan prinsip transparansi pemerintah Desa Beluluk mengalami keterlambatan dalam pemasangan spanduk yang disebabkan oleh terlambatnya pelaporan keuangan kepada pemerintah pusat. Keterlambatan yang terjadi membuat sebagian masyarakat menjadi tidak mengetahui informasi terkait penggunaan dana desa yang ada pada desanya itu sendiri khususnya bagi masyarakat yang rumahnya jauh dan jarang datang ke kantor desa. pembuatan kebijakan dana desa dilakukan melalui musyawarah desa dengan cara mengundang masyarakat untuk membuat kebijakan secara bersama-sama. Namun dalam kenyataannya, semakin banyaknya kebijakan terkait dana desa yang dibuat dan dirumuskan secara bersama-sama dapat menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, anggaran dana desa yang diterima Desa Beluluk mengalami penurunan. Pada tahun 2020, dana desa yang terima sebesar Rp. 785.715.000 sedangkan pada tahun 2021 dana desa yang diterima sebesar Rp. 769.993.000 (sumber : Kantor Pemerintah Desa). Hal ini berdampak pada penurunan alokasi dana desa yaitu berupa BLT (Bantuan Tunai Langsung) sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Adanya alokasi dana yang besar, yang disediakan oleh pemerintah pusat memerlukan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut dan juga transparansi dari pemerintah desa mengenai penggunaan dari dana tersebut. Selain itu, pemerintah desa perlu mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menjamin

kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Beluluk.
2. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh transparansi penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Beluluk.
3. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh kebijakan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Beluluk.
4. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi penggunaan dana desa dan kebijakan dana desa secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Beluluk.

II. LANDASAN TEORI

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas adalah tugas wali amanat untuk memberikan tanggungjawan, penyajian, pengungkapan dan pelaporan semua kegiatan pemerintah kepada pihak yang didelegasikan, yaitu masyarakat. Jenis akuntabilitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal
Akuntabilitas vertikal adalah kondisi dimana seseorang mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada jabatan otoritas di atasnya.
2. Akuntabilitas Horizontal
Akuntabilitas horizontal adalah tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan seperti hubungan dengan penyelesaian tugas pada pelayanan publik.

Alokasi Dana Desa

Menurut Kuswanti 2020, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada setiap desa untuk mendukung segala bentuk program dan kegiatan desa guna membantu pemerintah mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah No. 9 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa tujuan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

1. Membiayai program pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.

Pengelolaan alokasi dana desa dibagi menjadi 5 tahap yaitu:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Transparansi

Menurut Mardiasmo (2006), transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk membuat informasi tentang pengelolaan dana dan sumber daya publik tersedia bagi pihak-pihak yang berhak atas informasi tersebut.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari dua hal yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Dana Desa

Menurut Lili (2018) dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahunnya dari APBN yang sengaja disumbangkan ke desa dengan transfer langsung melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai semua proses pemerintahan atau pembangunan desa dan pemberdayaan seluruh masyarakat pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, sumber pendapatan desa dibagi menjadi:

1. Pendapatan asli desa.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
4. Bantuan keuangan ai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kebijakan Dana Desa

Menurut Novitasari (2019) kebijakan desa merupakan salah satu bentuk kebijakan yang harus disusun oleh aparat desa untuk menjalankan tanggung jawab tetap desa yang tetap berada dalam pengawasan pemerintah kabupaten/kota. Ukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan menanyakan apakah implementasi program tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya dan mencapai tujuan dari program kebijakan tersebut atau tidak.

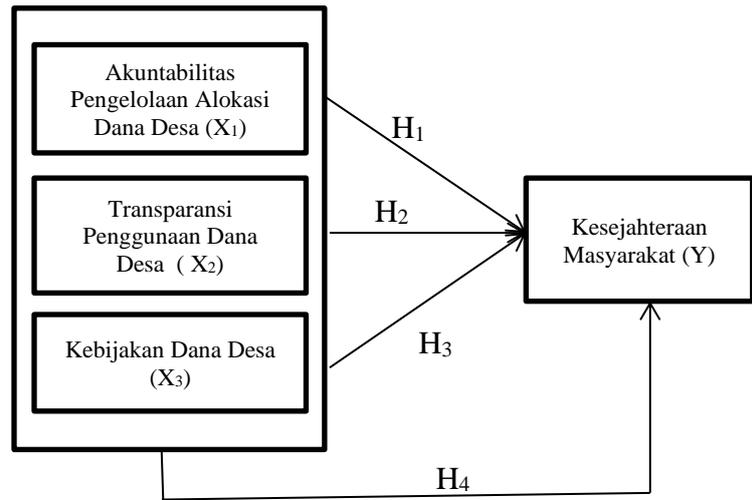
Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pada masyarakat yaitu pendapatan, konsumsi dan pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan transportasi.

Kerangka Berpikir

Berikut merupakan gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah peneliti,2022

Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. H1 : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) pada Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru. Kab. Bangka Tengah.
2. H2 : Transparansi Penggunaan Dana Desa (X2) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) pada Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah.
3. H3 : Kebijakan Dana Desa (X3) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) pada Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah.
4. H4 : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1),Transpaansi Penggunaan Dana Desa (X2), dan Kebijakan Dana Desa (X3) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) pada Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian menggunakan kuantitatif karena penelitian ini memerlukan survei dengan cara menyebarkan kuesioner. Semua variabel diuji secara statistik untuk melihat seberapa besar hubungan antar variabel. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi dan membuat perbandingan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2022.

Variabel yang Diteliti

Pada penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini terdapat 3 yaitu, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (X1), transparansi penggunaan dana desa (X2) dan kebijakan dana desa (X3). Sedangkan

variabel dependennya adalah kesejahteraan masyarakat (Y).

Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2018). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk Desa Beluluk yang berjumlah 3.988 orang yang tercatat pada tahun 2022.

Sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik tertentu yang menjadi bagian dari populasi (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya Penduduk yang sudah berkeluarga, Penduduk berdomisili tetap, dan Penduduk yang tercatat menjadi jiwa Desa Beluluk.

Dari pemilihan sampel diatas, dikarenakan jumlahnya masih banyak maka banyaknya sampel yang diambil oleh peneliti ditentukan dengan rumus slovin dengan tingkat kepercayaan 90% dengan nilai erorr sebesar 10%. Maka , perhitungan sampel dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{857}{1 + 857 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{857}{9,57} = 89,55 \text{ dibulatkan menjadi } = 90$$

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh sampel sebanyak 90 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yang dilakukan melalui kuesioner. Kuesioner ini berupa seperangkat pernyataan dibagikan kepada masyarakat desa Beluluk untuk dijawab.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka.

III METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penelitian ini memberikan berdasarkan statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Data responden berdasarkan jenis kelamin
2. Data responden berdasarkan umur
3. Data responden berdasarkan pendidikan terakhir
4. Data responden berdasarkan pekerjaan

Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono,2011). Sebuah instrumen dikatakan valid, jika mampu mengukur apa yang diinginkan atau mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Kriteria penyaajiannya, apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka pernyataan dinyatakan valid dan apabila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka pernyataan dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan konsisten atau tidaknya kuesioner dalam mengukur gejala yang sama lain di tempat yang berbeda. Peneliti mengukur reliabel suatu variabel dengan melihat jika *Cronbach's* $> 0,60$ maka variabel dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika *Cronbach's* $< 0,60$ maka variabel dinyatakan tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini adalah menguji apakah dalam model regresi, nilai residual telah terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2011). Nama lain uji normalitas disebut dengan uji distribusi normal yaitu uji untuk mengukur apakah data yang kita memiliki distribusi normal sehingga dapat diaplikasikan ke dalam statistik.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak di dalam regresi. Cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat tolerance value atau variance inflation faktor (VIF) yaitu jika nilai tolerance $> 0,10$ dengan nilai $VIF < 10$, maka hasilnya tidak ada multikolinearitas antar variabel dan apabila nilai tolerance $< 0,10$, maka hasilnya ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Jika residual satu observasi serupa dengan residual observasi lainnya, maka model regresi dapat memenuhi syarat atau disebut homoskedastisitas. Jika berbeda varian disebut heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Metode analisis yang dipakai untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Y = Kesejahteraan Masyarakat

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi variabel bebas

X1 = Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

X2 = Transparansi Penggunaan Dana Desa

X3 = Kebijakan Dana Desa

ϵ = Error term

Uji Koefisien Determinan

Uji koefisien determinansi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh model dapat menerangkan variasi dari variabel yang independen (Ghozali, 2016). Nilai yang dipakai dalam sebuah koefisien determinasi adalah seberapa besar 0 hingga 1. Jika hasil dibawah 0,5 atau mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terbatas. Tetapi jika hasil lebih dari 0,5 atau mendekati angka 1 berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

(Ghozali, 2011) pengujian secara parsial digunakan agar mengetahui pengaruh masing-masing dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan atas uji t adalah sebagai berikut:

Apabila nilai thitung > ttabel, maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika nilai thitung < ttabel, maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Apabila nilai signifikan atau probabilitas > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan atau probabilitas < 0,05 maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian Secara Simultan

Pengujian simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen bersama-sama atau secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan atas uji f adalah sebagai berikut: Jika nilai Fhitung > Ftabel, variabel independen memiliki pengaruh simultan pada variabel dependen. Nilai Fhitung < Ftabel, variabel independen tidak memiliki pengaruh simultan pada variabel dependen.

Apabila nilai signifikan atau probabilitas > 0.05 maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai signifikan atau probabilitas < 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

IV. PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1
Data responden berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Laki-Laki	56	62,2%
2	Perempuan	34	37,8%
	Total	90	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas, data responden sebanyak 90 orang yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 orang (62.2%) dan yang berjenis kelamin perempuan adalah sebesar 34 orang (37,8%).

Data Responden Berdasarkan Umur

Tabel 2
Data responden berdasarkan umur

NO	UMUR RESPONDEN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	21-30	18	20%
2	31-40	17	19%
3	41-50	36	40%
4	51-60	9	10%
5	61-70	8	9%
6	71-80	2	2%
	Total	90	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas, diketahui bahwa umur responden yang terbanyak adalah kategori umur 41-50 tahun (40%), pada kategori umur 21-30 tahun (20%), pada kategori 31-40 tahun (19%), pada kategori 51-60 tahun (10%), pada kategori 61-70 tahun (9%) dan pada kategori umur 71-80 tahun (2%).

Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 3
Data responden berdasarkan pendidikan terakhir

NO	PENDIDIKAN RESPONDEN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	SD	14	15,5%
2	SMP	27	30%
3	SMA/SMK	42	46,6%
4	DIPLOMA	1	1,1%
5	S-1	6	6,6%
	Total	90	100%

Sumber: Data diolah peneliti, tahun 2022.

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan responden yang mempunyai pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 42 orang (46,6%), pendidikan terakhir SMP sebanyak 27 orang (30%), pendidikan SD sebanyak 14 orang (15,5%), pendidikan terakhir S-1 adalah 6 orang (6,6%) dan yang berpendidikan terakhir Diploma adalah sebanyak 1 orang (1,1%).

Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4
Data responden berdasarkan pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	Buruh Harian	24	26,6%
2	Wiraswasta	26	28,8%
3	Ibu Rumah Tangga	20	22,2%
4	Karyawan Swasta	7	7,7%
5	Perangkat Desa	7	7,7%
6	Petani	3	3,3%
7	Polri	1	1,1%
8	Honor	2	2,2%
	Total	90	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4 diatas, diketahui bahwa pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Beluluk adalah wiraswasta sebanyak 26 orang (28,8%), buruh harian sebanyak 24 orang (26,6%), ibu rumah tangga sebanyak 20 orang

(22,2%), karyawan swasta dan perangkat desa jumlahnya sama yaitu sebanyak 7 orang (7,7%), petani sebanyak 3 orang (3,3%), polri 1 orang (1,1%) dan honor sebanyak 2 orang (2,2%).

Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1)

Tabel 5
Hasil uji validitas pengelolaan alokasi dana desa(X1)

Indikator Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	P-value	Keterangan
APADD.X1	0.580	0.207	< .001	Valid
APADD.X2	0.531	0.207	< .001	Valid
APADD.X3	0.714	0.207	< .001	Valid
APADD.X4	0.731	0.207	< .001	Valid
APADD.X5	0.472	0.207	< .001	Valid
APADD.X6	0.554	0.207	< .001	Valid
APADD.X7	0.569	0.207	< .001	Valid
APADD.X8	0.594	0.207	< .001	Valid
APADD.X9	0.679	0.207	< .001	Valid
APADD.X10	0.467	0.207	< .001	Valid
APADD.X11	0.758	0.207	< .001	Valid
APADD.X12	0.726	0.207	< .001	Valid

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022 dengan *application JASP 0.14.1*

Berdasarkan tabel 5 diatas, seluruh item pernyataan sebanyak 12 (dua belas) item memiliki nilai r-hitung > r-tabel dan nilai *p-value* setiap indikator kurang dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan masing-masing item pernyataan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dinyatakan valid dan mampu mengukur dengan baik apa yang diteliti.

Transparansi Penggunaan Dana Desa (X2)

Tabel 6
Hasil uji validitas transparansi penggunaan dana desa (X2)

Indikator Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	P-value	Keterangan
TPDD.X1	0.682	0.207	< .001	Valid
TPDD.X2	0.780	0.207	< .001	Valid
TPDD.X3	0.722	0.207	< .001	Valid
TPDD.X4	0.668	0.207	< .001	Valid
TPDD.X5	0.651	0.207	< .001	Valid
TPDD.X6	0.763	0.207	< .001	Valid
TPDD.X7	0.606	0.207	< .001	Valid
TPDD.X8	0.667	0.207	< .001	Valid
TPDD.X9	0.665	0.207	< .001	Valid
TPDD.X10	0.751	0.207	< .001	Valid

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022 dengan *application JASP 0.14.1*

Berdasarkan tabel 6 diatas, seluruh item pernyataan sebanyak 10 (sepuluh) item memiliki nilai r-hitung > r-tabel dan nilai *p-value* setiap indikator kurang dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan variabel Transparansi Penggunaan Dana Desa dinyatakan valid dan mampu mengukur dengan baik apa yang diteliti.

Kebijakan Dana Desa (X3)

Tabel 7
Hasil uji validitas kebijakan dana desa(X3)

Indikator Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	p-value	Keterangan
KDD.X1	0.827	0.207	< .001	Valid
KDD.X2	0.706	0.207	< .001	Valid
KDD.X3	0.807	0.207	< .001	Valid
KDD.X4	0.637	0.207	< .001	Valid
KDD.X5	0.617	0.207	< .001	Valid

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022 dengan *application JASP 0.14.1*

Berdasarkan tabel 7 diatas, seluruh item pernyataan variabel Kebijakan Dana Desa sebanyak 5 (lima) item memiliki nilai r-hitung > r-tabel dan nilai *p-value* setiap indikator kurang dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan variabel Kebijakan Dana Desa dinyatakan valid dan mampu mengukur dengan baik apa yang diteliti.

Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Tabel 8
Hasil uji validitas kesejahteraan masyarakat (Y)

Indikator Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	P-value	Keterangan
KM.X1	0.800	0.207	< .001	Valid
KM.X2	0.820	0.207	< .001	Valid
KM.X3	0.863	0.207	< .001	Valid
KM.X4	0.707	0.207	< .001	Valid
KM.X5	0.689	0.207	< .001	Valid
KM.X6	0.717	0.207	< .001	Valid
KM.X7	0.667	0.207	< .001	Valid
KM.X8	0.771	0.207	< .001	Valid
KM.X9	0.665	0.207	< .001	Valid
KM.X10	0.567	0.207	< .001	Valid

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022 dengan *application JASP 0.14.1*

Berdasarkan hasil uji validitas variabel Kesejahteraan Masyarakat semua item sebanyak 10 (sepuluh) item memiliki nilai r-hitung > r-tabel dan nilai *p-value* setiap indikator kurang dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan Kesejahteraan Masyarakat dinyatakan valid dan mampu mengukur dengan baik apa yang diteliti.

Uji Reliabilitas

Tabel 9
Koefisien Reliabilitas

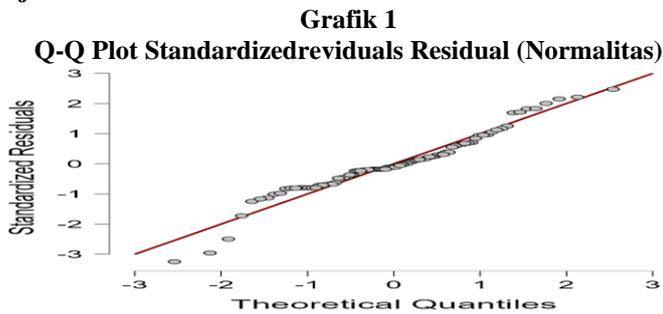
No	Variabel	Koefisien Reliabilitas (Alpha)	Keterangan
1	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X ₁)	0.847	Reliable
2	Transparansi Penggunaan Dana Desa (X ₂)	0.881	Reliable
3	Kebijakan Dana Desa (X ₃)	0.769	Reliable
4	Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0.902	Reliable

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022 dengan *application JASP 0.14.1*

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai

Cronbach's $\alpha > 0,60$, sehingga dapat dikatakan bahwa masing-masing kuesioner variabel dinyatakan *reliable* yang berarti kuesioner dalam penelitian ini dapat dipercaya.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas



Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022 dengan *application JASP 0.14.1*

Berdasarkan grafik 1 uji normalitas data, terdapat titik-titik disekitar garis diagonal dan titik tersebut menyebar mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

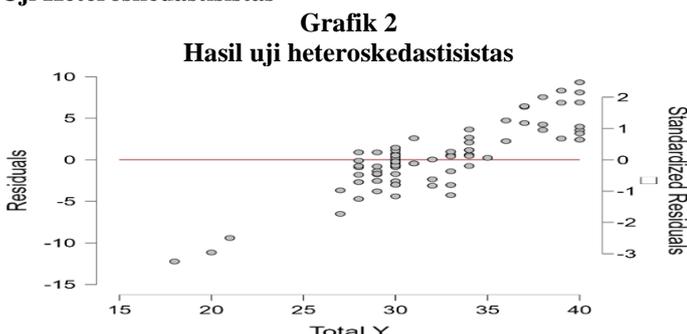
Tabel 10
Uji Multikolinearitas

Coefficients			
Model	Variabel	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
H ₀	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X ₁)	0.687	1.455
	Transparansi Penggunaan Dana Desa (X ₂)	0.609	1.642
	Kebijakan Dana Desa (X ₃)	0.710	1.409

Sumber: : Data diolah oleh peneliti 2022 dengan *application JASP 0.14.1*

Berdasarkan Tabel 10 diatas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance untuk variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (X₁) yaitu $0,847 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1.455 < 10$, transparansi Penggunaan dana desa (X₂) nilai tolerance sebesar $0.609 > 0.10$ dan nilai VIF sebesar $1.642 < 10$ dan kebijakan dana desa (X₃) nilai tolerance sebesar $0.710 > 0.10$ dan nilai VIF sebesar $1.409 < 10$ maka dapat disimpulkan variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi penggunaan dana desa dan kebijakan dana desa tidak menunjukkan terjadinya multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini sehingga model regresi ini dikatakan baik.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022 dengan *application JASP 0.14.1*
Berdasarkan Grafik 2 diatas, menunjukkan bahwa pada

model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang dapat dilihat dari gambar tersebut adalah dari titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu *Standardized Residuals* dan titik-titik tersebut tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.

Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 11
Hasil Uji Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R ²	Adjusted R ²	Keterangan
H ₁	0.525	0.276	0.250	Variabel bebas hanya mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 27,6%

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022 dengan *application JASP 0.14.1*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini adalah sebesar 0,276 atau 27,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan dengan variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi penggunaan dana desa, dan kebijakan dana desa sedangkan sisanya 0,724 atau 72,4% dapat dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak diketahui atau diteliti.

Uji Parsial (uji t)

Tabel 12
Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients					
Model		Unstandardized	Standardized	t	p
H ₀	(Intercept)	31.900		68.363	< .001
H ₁	(Intercept)	13.063		2.761	0.007
	Total X ₁	0.381	0.329	2.974	0.004
	Total X ₂	0.484	0.377	3.207	0.002
	Total X ₃	-0.708	-0.314	-2.886	0.005

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022 dengan *application JASP 0.14.1*

Menentukan ttabel, maka dilakukan perhitungan dengan rumus dibawah ini yaitu:

Df= (n-k)

Df= (90-4)

Df= 86/dilihat dari t tabel =1.987

1. Variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (X₁) berdasarkan hasil perbandingan dimana thitung 2,974 > ttabel 1,987 dan nilai signifikan 0,004 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (X₁) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y).
2. Variabel transparansi penggunaan dana desa (X₂) berdasarkan hasil perbandingan dimana thitung 3,207 > ttabel 1,987 dan nilai signifikan 0,002 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi penggunaan dana desa (X₂) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y).
3. Variabel kebijakan dana desa (X₃) berdasarkan hasil perbandingan dimana thitung -2,886 > ttabel 1,987 dan nilai

signifikan $0,005 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan dana desa memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y).

Uji Simultan (uji f)

Tabel 13
Hasil Uji F
ANOVA

Model		Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	p
H ₁	Regression	480.507	3	160.169	10.901	<.001
	Residual	1263.593	86	14.639		
	Total	1744.100	89			

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2022 dengan *application JASP 0.14.1*

Menentukan Ftabel maka pertama dilakukan perhitungan dengan rumus dibawah ini:

$$Df1 = (k-1)$$

$$Df2 = (n-k)$$

$$Df1 = (4-1) = 3$$

$$Df2 = (90-4) = 86 / \text{dilihat dari Ftabel} = 2.71$$

Berdasarkan hasil uji F dilakukan perbandingan $F_{hitung} 10,901 > F_{tabel} 2,71$ dan nilai signifikan $0,001 > 0,05$ maka disimpulkan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, transparansi penggunaan dana desa dan kebijakan dana desa memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan terhadap penelitian yang telah dianalisis, maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai $t_{hitung} 2.974 > 1.987 t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0.004 < 0.05$ sehingga H₁ diterima.
2. Variabel Transparansi Penggunaan Dana Desa (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai $t_{hitung} 3.207 > 1.987 t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0.002 < 0.05$, sehingga H₂ diterima.
3. Variabel Kebijakan Dana Desa (X3) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai $t_{hitung} -2886 > 1.987 t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0.005 < 0.05$, sehingga H₃ diterima.
4. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi Penggunaan Dana Desa dan Kebijakan Dana Desa secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai $f_{hitung} 10.901 > 2.711 f_{tabel}$ dan nilai

signifikansi $0.001 < 0.05$, sehingga H₄ diterima.

Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Beluluk diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa dan penggunaan dana desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah Desa Beluluk diharapkan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan secara maksimal sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian atau mengganti variabel penelitian agar dapat menambah wawasan baru.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih dari satu desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abentian, 2019. *Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung.
- [2] Adrianto, N.2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Public melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publisng.
- [3] Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [4] Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : Salemba Empat.
- [5] KPPN Bukittinggi.2021 "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya" <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, diakses pada tanggal 16 februari 2022.
- [6] Mardiasmo.2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1).
- [7] Peraturan Bupati Bangka Tengah No 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.
- [9] Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- [10] Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11)
- [11] Sari, Tania Mandy. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Surabaya. STIESIA
- [12] Samryn, L.M. 2014. *Pengantar Akuntansi*. Edisi IFRS. Jakarta: Rajawali Pers.
- [13] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Sutrawan, Nyoman Rodi. 2020 "Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2020” <http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/66-PRIORITAS-PENGGUNAAN-DANA-DESA-TAHUN-2021>, diakses pada tanggal 16 februari 2022.

- [15] Widyanti, Rahmi. 2019. *Perilaku Organisasi (Teori & Konsep) jilid-1*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.